TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 3978-3984
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Historical Development of Islamic Education in Indonesia: Intersections of Culture and Politics

Suheri[1], Zaenury[2], Bedjo Sujanto[3]
Universitas PTIQ Jakarta, STIT Ad-Da'wah Rangkasbitung, Universitas PTIQ Jakarta,
suhericirende123@gmail.com, zaenuri.stitaddawah@gmail.com, susanto@ptiq.ac.id

ABSTRACT
Islamic education in Indonesia has a long history that is inseparable from the dynamics of culture and politics. Since the introduction of Islam to the Indonesian archipelago in the thirteenth century, educational institutions such as *pesantren*, *surau*, and *madrasah* have developed as centers for the transmission of Islamic knowledge and the formation of social and cultural identity. Islamic education has served not only as a medium for religious propagation (*da'wah*) but also as a cultural institution that has adapted to local traditions. At the same time, it has been shaped by political forces, including colonial rule, state policies, and changing power structures. During the Dutch colonial period, Islamic education was subject to restrictions because it was perceived as a potential political threat. Following Indonesia's independence, Islamic education was incorporated into the national education system, although it remained under state regulation. The Reform Era subsequently created greater opportunities for the development of Islamic education, enabling it to function both as a means of religious outreach and as an instrument influencing public policy. The interplay between cultural and political forces has made Islamic education in Indonesia distinctive, as it serves not only as a vehicle for learning but also as a space for negotiating identity, power, and culture. This study aims to analyze the historical development of Islamic education in Indonesia from cultural and political perspectives and to discuss its implications for contemporary Islamic education policy.

Keywords: Islamic Education; History; Culture; Politics; Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya dan politik bangsa. Sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, pendidikan Islam berkembang melalui lembaga-lembaga tradisional seperti surau, pesantren, dan madrasah yang menjadi pusat transmisi ilmu agama sekaligus pembentukan budaya masyarakat. Lembaga-lembaga ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah pembentukan identitas sosial, politik, dan budaya umat Islam di Indonesia.[1]

Dalam konteks budaya, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan tradisi lokal. Misalnya, pesantren di Jawa tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan seni tradisional seperti wayang dan gamelan sebagai media dakwah.[2] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan produk budaya yang adaptif terhadap kearifan lokal, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah pluralitas masyarakat.

[1] Ruhyana, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Produk Budaya dan Politik*, Universitas PTIQ Jakarta, 2025.
[2] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Namun, pendidikan Islam juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam seringkali dipandang sebagai ancaman karena dianggap dapat membangkitkan semangat perlawanan.[3] Pemerintah kolonial kemudian menerapkan kebijakan yang membatasi perkembangan pesantren dan madrasah. Di sisi lain, pendidikan Barat diperkenalkan untuk mencetak birokrat yang loyal kepada kolonial. Kondisi ini menimbulkan dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang dampaknya masih terasa hingga kini.[4]

Setelah Indonesia merdeka, politik pendidikan Islam mengalami transformasi signifikan. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam mulai diakui secara formal melalui integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional.[5] Namun, pada masa Orde Baru, kebijakan politik lebih menekankan pada kontrol negara terhadap lembaga pendidikan Islam, sehingga pesantren dan madrasah harus menyesuaikan diri dengan kurikulum nasional.[6] Meski demikian, pesantren tetap menjadi basis penting dalam melahirkan tokoh-tokoh politik dan sosial yang berpengaruh.

Era Reformasi membawa perubahan besar dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan. Pendidikan Islam memperoleh ruang lebih luas untuk berkembang, baik melalui pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi Islam.[7] Selain itu, munculnya partai-partai Islam dan organisasi masyarakat Islam turut memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai arena politik dan budaya. Pendidikan Islam tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam membentuk kebijakan publik dan arah pembangunan bangsa.[8]

Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya dialektika antara budaya dan politik. Di satu sisi, pendidikan Islam merupakan produk budaya yang berakar pada tradisi lokal dan nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, ia juga merupakan produk politik yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, kolonialisme, dan dinamika kekuasaan. Dialektika ini menjadikan pendidikan Islam di Indonesia unik, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai arena perjuangan identitas, kekuasaan, dan kebudayaan.

Kajian mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia penting dilakukan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berperan dalam membentuk masyarakat dan bangsa. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan pendidikan Islam di masa kini, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan akar budaya dan nilai politik yang melekat di dalamnya.[9]

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kerangka teori yang releven dengan tema pada penulisan ini, maka kerangka teori ini terdiri dari emapat kerangka teori di antaranya adalah:

1. Pendidikan Islam sebagai produk budaya merupakan teori fungsionalisme budaya dimana Pendidikan Islam dipandang sebagai mekanisme pewarisan nilai dan norma yang berakar pada tradisi lokal. Pesantren, surau, dan madrasah berfungsi sebagai agen sosialisasi budaya Islam yang beradaptasi dengan kearifan lokal.[10] dan teori akulturasi dimana Pendidikan Islam di Indonesia tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan berinteraksi dengan budaya Nusantara. Proses akulturasi ini melahirkan bentuk pendidikan Islam yang khas, misalnya integrasi seni tradisional dalam dakwah pesantren.[11]

[3] Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
[4] Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
[5] Departemen Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Diklat, 2003.
[6] Maghfiroh, Nailil dkk., *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*, Pascasarjana IAIN Salatiga, 2025.
[7] Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Amsterdam University Press, 2006.
[8] Lusyana, Aam & Putri, Aan Iminullah Eka, *Pengaruh Sejarah Politik terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Zawayatul Fikr Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 1, 2025.
[9] Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
[10] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
[11] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

2. Pendidikan Islam sebagai Produk Politik merupakan Teori Kekuasaan Michel Foucault menjelaskan bahwa pendidikan dipandang sebagai arena produksi dan reproduksi kekuasaan. Pendidikan Islam di Indonesia sering kali menjadi objek regulasi politik, baik pada masa kolonial maupun pasca-kemerdekaan.[12] Dan Teori Negara dan Hegemoni Gramsci menjelaskan bahwa Negara menggunakan pendidikan sebagai alat hegemoni. Pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk keseragaman ideologi, namun tetap menjadi ruang resistensi politik umat Islam.[13]
3. Dialektika Budaya dan Politik dalam Pendidikan Islam dimana Pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tarik-menarik antara budaya lokal dan kebijakan politik negara. Dialektika ini menghasilkan dinamika yang unik sehingga pendidikan Islam menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus arena perjuangan politik.[14]

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif budaya dan politik. Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sebagai produk budaya yang berakar pada tradisi lokal, menganalisis pengaruh politik kolonial dan kebijakan negara terhadap dinamika pendidikan Islam, menjelaskan dialektika antara budaya dan politik dalam membentuk karakter pendidikan Islam di Indonesia, dan memberikan perspektif kritis terhadap implikasi sejarah pendidikan Islam bagi kebijakan pendidikan Islam di era kontemporer.

Sedangkan manfaat peenelitian terbagi menjadi manfaat teoretis yaitu memberikan kontribusi akademik dalam kajian sejarah pendidikan Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara budaya dan politik dan menjadi referensi bagi pengembangan teori pendidikan Islam yang kontekstual dengan realitas sosial-politik Indonesia. Dan manfaat praktisnya yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan Islam dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap budaya lokal dan dinamika politik, memberikan wawasan bagi praktisi pendidikan Islam (guru, dosen, pengelola pesantren/madrasah) untuk memahami akar sejarah dan implikasinya terhadap praktik pendidikan saat ini, dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai pendidikan Islam dalam perspektif multidisipliner.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dengan membaca, memahami, menelaah dan menganalisis data-data yang telah ditemukan atau tulisan- tulisan (Sari, M., & Asmendri, 2020) baik dari majalah, surat kabar, mengakses situs-situs internet maupun dengan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dan Pendekatan historis dipilih karena fokus kajian adalah menelusuri perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks budaya dan politik dari masa ke masa.[15]

Dan sumber data yang dijadikan dokumen sejarah, arsip kebijakan pendidikan Islam, serta karya-karya ulama dan tokoh pendidikan Islam yang relevan sebagai data primer dan Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas pendidikan Islam di Indonesia sebagai data skunder.[16] sedangkan teknik pengumpulan data melalui Studi Literatur dengan membaca dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, baik klasik maupun

[12] Foucault, Michel, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books, 1995.
[13] Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1971.
[14] Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
[15] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

modern. Dan melalui dokumentasi dengan menelaah arsip kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam, termasuk regulasi kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.[17]

Teknik Analisis Data Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis historis-kritis, yaitu deskriptif dengan menggambarkan fakta sejarah pendidikan Islam di Indonesia, analisis kritis dengan mengkaji hubungan antara pendidikan Islam dengan budaya dan politik, dan Interpretatif dengan Menafsirkan makna dialektika budaya dan politik dalam membentuk karakter pendidikan Islam di Indonesia.[18] Dengan lokasi dan waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur yang bersumber dari perpustakaan universitas, arsip digital, dan jurnal akademik. Waktu penelitian berlangsung selama periode penyusunan makalah pada semester berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam sebagai Produk Budaya

Kajian mengenai pendidikan Islam sebagai produk budaya banyak dibahas oleh para ahli. Azyumardi Azra menekankan bahwa jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah berperan besar dalam membentuk corak pendidikan Islam yang khas di Indonesia.[19] Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai media akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dalam tradisi pesantren yang mengintegrasikan budaya Jawa, Sunda, dan Minangkabau dalam praktik pendidikan.[20] Koentjaraningrat menambahkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian dari sistem budaya yang lebih luas, di mana nilai-nilai agama berinteraksi dengan adat dan tradisi lokal.[21] Dengan demikian, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai produk budaya yang adaptif dan dinamis.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, dan madrasah lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mempelajari agama sekaligus mempertahankan identitas budaya. Pesantren di Jawa, misalnya, tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga mengintegrasikan tradisi lokal seperti seni wayang dan gamelan sebagai media dakwah.[22] Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan produk budaya yang adaptif, mampu menyerap unsur lokal tanpa kehilangan esensi keislamannya.

Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai sosial. Surau di Minangkabau, misalnya, menjadi pusat pembentukan karakter generasi muda dengan menggabungkan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.[23] Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai agen sosialisasi budaya yang memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Pendidikan Islam di Indonesia lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memahami ajaran agama sekaligus mempertahankan identitas budaya. Pesantren, surau, dan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan. Pesantren di Jawa, misalnya, mengintegrasikan tradisi lokal seperti wayang, gamelan, dan seni batik sebagai media dakwah.[24] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan kearifan lokal, sehingga tetap relevan di tengah pluralitas masyarakat Nusantara.

Diskusi mengenai pendidikan Islam sebagai produk budaya menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam tidak berdiri dalam ruang kosong. Ia tumbuh dari interaksi antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Surau di Minangkabau, misalnya, menjadi pusat

[17] Departemen Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Diklat, 2003.
[18] Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, New York: Alfred A. Knopf, 1969.
[19] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.
[20] Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
[21] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
[22] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.
[23] Navis, A.A., *Surau: Pendidikan Tradisional dalam Masyarakat Minangkabau*, Padang: Yayasan Sako Batuah, 1984.
[24] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pembentukan karakter generasi muda dengan menggabungkan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.[2] Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai agen sosialisasi budaya yang memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Pendidikan Islam sebagai Produk Politik

Steenbrink menyoroti bagaimana pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda seringkali dipandang sebagai ancaman politik.[25] Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam sering dianggap sebagai ancaman karena berpotensi membangkitkan semangat perlawanan.[26] Pemerintah kolonial membatasi perkembangan pesantren dan madrasah, sementara pendidikan Barat diperkenalkan untuk mencetak birokrat yang loyal kepada kolonial. Kondisi ini menimbulkan dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang dampaknya masih terasa hingga kini. Mujiburrahman menjelaskan bahwa pendidikan Islam sering kali dijadikan instrumen politik untuk menjaga stabilitas nasional.[27] Namun, pesantren tetap menjadi basis penting dalam melahirkan tokoh-tokoh politik dan sosial yang berpengaruh. Pendidikan Islam di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik. Pasca-kemerdekaan, pendidikan Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pada masa Orde Baru, kebijakan politik lebih menekankan pada kontrol negara terhadap lembaga pendidikan Islam.[28] Pesantren dan madrasah harus menyesuaikan diri dengan kurikulum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan arena politik yang dipengaruhi oleh kebijakan negara.

Dialektika Budaya dan Politik

Dialektika antara budaya dan politik dalam pendidikan Islam di Indonesia menghasilkan dinamika yang unik. Gramsci melalui konsep hegemoni menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi alat negara untuk membentuk keseragaman ideologi.[29] Namun, pendidikan Islam juga menjadi ruang resistensi politik umat Islam. Hal ini terlihat dalam peran pesantren dan madrasah sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme maupun sebagai arena pembentukan identitas politik umat Islam di era modern.[30]

Pendidikan Islam di Era Kontemporer, Era Reformasi membawa perubahan besar dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memperoleh ruang lebih luas untuk berkembang, baik melalui pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi Islam.[31] Lusyana dan Putri menekankan bahwa pendidikan Islam kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam membentuk kebijakan publik.[32]

Dialektika antara budaya dan politik dalam pendidikan Islam di Indonesia menghasilkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Di sisi lain, ia juga menjadi arena politik yang dipengaruhi oleh kebijakan negara dan kolonialisme.[33]

Pesantren, misalnya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme sekaligus wadah pembentukan identitas politik umat Islam. Pada masa Reformasi, pendidikan Islam memperoleh ruang lebih luas untuk berkembang, baik melalui pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi Islam.[34] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam membentuk kebijakan publik dan arah pembangunan bangsa.

[25] Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
[26] Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
[27] Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Amsterdam University Press, 2006.
[28] Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Amsterdam University Press, 2006.
[29] Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1971.
[30] Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
[31] Departemen Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Diklat, 2003.
[32] Lusyana, Aam & Putri, Aan Iminullah Eka, *Pengaruh Sejarah Politik terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Zawayatul Fikr Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 1, 2025.
[33] Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1971.
[34] Departemen Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Diklat, 2003.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Implikasi Kontemporer Sejarah pendidikan Islam di Indonesia memberikan implikasi penting bagi kebijakan pendidikan Islam di era kontemporer. Pertama, pendidikan Islam harus tetap mempertahankan akar budaya lokal agar tidak kehilangan identitas. Kedua, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan dinamika politik tanpa kehilangan independensinya. Ketiga, pendidikan Islam harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi.[7]

Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai produk budaya dan politik yang saling berinteraksi. Dialektika ini menjadikan pendidikan Islam unik, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai arena perjuangan identitas, kekuasaan, dan kebudayaan. Berikut adalah gambar diagram alur (flowchart) yang menjelaskan hubungan budaya, politik dan implikasi bisa lebih dipahami.

KESIMPULAN

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia memperlihatkan adanya dialektika yang kuat antara budaya dan politik. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai produk budaya yang berakar pada tradisi lokal, seperti pesantren, surau, dan madrasah menjadi wadah pembentukan identitas sosial sekaligus pusat akulturasi nilai Islam dengan budaya Nusantara. Sebagai Produk Budaya, pendidikan Islam berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan tradisi lokal. Hal ini menjadikan pendidikan Islam unik dan berbeda dengan model pendidikan Islam di negara lain.

Di sisi lain, pendidikan Islam juga merupakan produk politik yang dipengaruhi oleh kolonialisme, kebijakan negara, dan dinamika kekuasaan. Pada masa kolonial, pendidikan Islam dibatasi karena dianggap sebagai ancaman politik. Pasca-kemerdekaan, pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional, meski tetap berada dalam kontrol negara. Era Reformasi kemudian membuka ruang lebih luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang, baik sebagai sarana dakwah maupun sebagai instrumen politik dalam membentuk kebijakan publik. Sebagai Produk Politik**,** pendidikan Islam sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Pada masa kolonial, ia dibatasi karena dianggap berbahaya. Pada masa Orde Baru, ia dikontrol untuk menjaga stabilitas politik. Namun, pendidikan Islam juga menjadi ruang resistensi dan pembentukan identitas politik umat Islam.

Dialektika budaya dan politik ini menjadikan pendidikan Islam di Indonesia unik, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai arena perjuangan identitas, kekuasaan, dan kebudayaan. Sejarah ini memberikan pelajaran penting bahwa pendidikan Islam harus mampu menjaga akar budaya sekaligus beradaptasi dengan dinamika politik agar tetap relevan di era kontemporer. Dan dialektika budaya dan politik memperlihatkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia selalu berada dalam posisi adaptif. Ia mampu bertahan karena fleksibel terhadap budaya lokal, sekaligus dinamis dalam menghadapi tekanan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.

Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI. (2003). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Diklat.

Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Gottschalk, L. (1969). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. New York: Alfred A. Knopf.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lusyana, A., & Putri, A. I. E. (2025). Pengaruh Sejarah Politik terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Zawayatul Fikr Journal of Islamic Education*, 1(1).

Maghfiroh, N., dkk. (2025). *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*. Pascasarjana IAIN Salatiga.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Navis, A. A. (1984). *Surau: Pendidikan Tradisional dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: Yayasan Sako Batuah.

Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.

Ruhyana. (2025). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Produk Budaya dan Politik*. Universitas PTIQ Jakarta.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135